



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

# **==RENCANA KERJA TAHUN 2025==**

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO



DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan acuan perencanaan kegiatan PD selama satu tahun. Adapun penyusunan rencana kerja PD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan nantinya akan dituangkan ke dalam rancana awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dimana terdapat 4 (empat) program yang terdiri dari 3 (Tiga Program Prioritas) dan 1 (satu) program pendukung.

Harapan kami semoga rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2025.

Mojokerto, Desember 2024



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD.....	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	19
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD .....	20
2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	35
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	35
3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	50
BAB V PENUTUP.....	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 3 yaitu “*Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah*”, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan untuk menyusun rencana kerja PD (sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun). Penyusunan rencana kerja PD ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rencana Kerja PD dibahas pada forum PD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto membuat rencana kerja yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Selain itu rencana

kerja ini menjabarkan visi dan misi kepala daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistik.

Bahwa dalam merumuskan tujuan yang jelas, faktual dan realistik perlu diketahui dan diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dikaitkan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kebijakan di daerah Provinsi. Kebijakan- kebijakan tersebut meliputi antara Visi dan Misi Para Pemangku kewenangan di Pusat dan daerah yang meliputi antara lain:

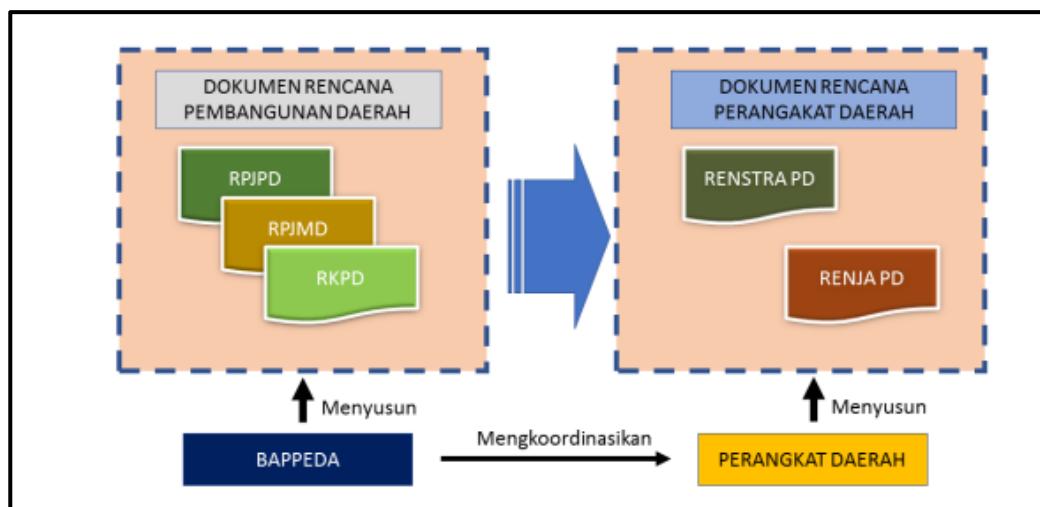
**Tabel 1**  
**KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN), PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN		PEMERINTAH DAERAH PROV. JAWA TIMUR		PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO	
	VISI	SASARAN STRATEGIS	VISI	SASARAN STRATEGIS PD	VISI	SASARAN STRATEGIS PD
	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera	1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024; 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera Unggul dan Berakhhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	1. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor Ketenagakerjaan; 2. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam rangka hubungan industrial yang kondusif dan perlindungan tenaga kerja; 3. Meningkatnya taraf ekonomi transmigran.	Terwujudnya masyarakat jawa timur yang adil, sejahtera unggul dan berakhhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong	1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kersempatan kerja dan penempatan tenaga kerja; 2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis dinamis dan kondusif serta optimisasi perlindungan ketenagakerjaan

Perumusan kebijakan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, dengan mengacu pada RKPD tersebut maka diharapkan dokumen Rencana Kerja PD yang tersusun

terjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dapat berhasil dan tepat sasaran melalui konsistensi pemahaman antar dokumen baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota..

**Diagram 1**  
**Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto:

a. Maksud :

1. menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan,
2. menentukan lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan
3. serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya rencana kerja adalah sebagai perwujudan dokumen perumusan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun N+1 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang rencana kerja perangkat daerah, proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah, Keterkaitan antara RENJA PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, RENJA K/L dan RENJA PROVINSI, Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana kerja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan PD dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

### **BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

### **BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

### **BAB V. Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)**

### **PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra PD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Renstra PD. Rincian pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 meliputi kinerja dan anggaran per program adalah sebagai berikut :

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Program ini terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan, untuk pencapaian kinerja dengan 2 indikator program yaitu nilai sakip perangkat daerah yaitu 83,01 dan target yang dicanangkan 84,40 capaiannya sebesar 98,35%. Dan indikator kedua adalah jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 2 Inovasi tercapai 2 inovasi sehingga persentase capaian sebesar 100% sementara untuk persentase realisasi anggaran sebesar 86,90%.

##### **2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan indikator Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja sebesar 100%, dengan output kinerja yang dihasilkan berupa 1 (satu) dokumen rencana tenaga kerja 2023-2028. Untuk realisasi anggaran sebesar 96,66%.

##### **3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

Indikator dari program ini adalah persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi. Pada tahun 2023 realisasi capaian keuangan sebesar 83,56% dan realisasi capaian kinerja sebesar 28,83% dari target 25%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

##### **4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**

Indikator dari program penempatan tenaga kerja adalah persentase informasi lowongan kerja yang terpenuhi. Pada tahun 2023 realisasi capaian

keuangan sebesar 93,29%. Sementara untuk capaian kinerja sebesar 72,41% dari target sebesar 72%. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

## 5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator program hubungan dari program hubungan industrial adalah persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan persentase tenaga kerja yang terdaftar jaminan sosial. Pada tahun 2023 realisasi capaian penyerapan anggaran sebesar 97,52%. Untuk realisasi kinerja dari indikator program yaitu persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebesar 80,95% dari target rencana kerja sebesar 80% dan persentase tenaga kerja yang terdaftar jaminan sosial sebesar 56,91% dari target sebesar 56%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Selanjutnya pencapaian rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

**TABEL TC-29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KAB. MOJOKERTO**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN WAJIB									
	KETENAGAKERJAAN									
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,90 (A)	72,11 (A)	84,40 (A)	83,01	98,35	84,90 (A)	240,02	2,83
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	2 inovasi	2 Inovasi	100	1 inovasi	4	4,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	3	3,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6	3,00
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2 dokumen	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	10	2,50
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	90%	100%	100,00	90%	2,8	3,11

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembiayaan Gaji dan TunJumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bln	14 bulan	36 orang/bln	36 orang/bln	100	36 orang/bln	86	2,39
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	75%	75%	75%	100	75%	2,25	3,00
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	7 kegiatan	6 paket	6 paket	100	7 paket	20	2,86
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	12 kegiatan	5 paket	5 paket	100	7 paket	24	3,43
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	13 kegiatan	13 paket	13 paket	100	13 paket	39	3,00
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 paket	1 kegiatan	1 paket	1 paket	100	1 paket	3	3,00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	100 kegiatan	100 laporan	100 laporan	100	100 laporan	300	3,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36	3,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36	3,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	6 kendaraan	6 unit	6 unit	100	6 unit	18	3,00
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	3 kegiatan	1 unit	1 unit	100	1 unit	5	5,00
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 unit	18 unit	15 unit	15 unit	100	18 unit	51	2,83
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0 dokumen	1	0,00
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0 dokumen	1	0,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	41,67%	25%	28,83	115,32	30%	29,55	98,49
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	128 orang	192 orang	144 orang	117 orang	100	128 orang	437	3,41
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	128 orang	176 orang	128 orang	117 orang	91,41	128 orang	421	3,29
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimisasasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 lembaga	16 orang	16 lembaga	16 lembaga	100,00	0 lembaga	32	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	100	30 lembaga	90	3,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	100,00	30 lembaga	90	3,00
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 perusahaan	4 perusahaan	4 perusahaan	4 perusahaan	100	0 perusahaan	8	0,00
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	0 perusahaan	4 perusahaan	4 perusahaan	4 perusahaan	100,00	0 perusahaan	8	0,00
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	71,74%	72%	72,41	103,44	72%	73,8	102,57

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 orang	3 kk	3 orang	1 orang	33,33	1 orang	5	5,00
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	30 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100,00	30 orang	50	1,67
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 orang	40 orang	45 orang	45 orang	100,00	50 orang	135	2,70
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100	20 orang	60	3,00
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100,00	20 orang	60	3,00
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	0 orang	60	0,00
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100,00	0 orang	60	0,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	100%	80%	80,95	101,2	80%	82,75	103,44
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%	55,02%	56%	56,91	103,5	56%	58,02	103,61
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100	100,00%	3	3,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 perkara	190 orang	4 perkara	4 perkara	100,00	4 perkara	198	49,50
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 perkara	10 penanganan	10 perkara	10 perkara	100,00	10 perkara	30	3,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	2 kegiatan	1 lembaga	1 lembaga	100,00	1 lembaga	4	4,00
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27945 orang	85 perusahaan	27900 orang	27900 orang	100,00	27945 orang	55930	2,00
	JUMLAH						102,93			

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bahwa kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dirumuskan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama, antara lain:

1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten;
3. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
4. Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja dalam Jaminan Sosial.

Target dan realisasi pencapaian dari 4 (empat) indikator kinerja utama dan Indikator kinerja individu sebagaimana terdapat pada Tabel TC-30.

**TABEL TC-30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	INDIKATOR	SPM STANDAR / OPERASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>										
1	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG BERKUALITAS DAN KOMPETEN			85%	87%	85,06	85,21	87%	90%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
2	PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA			84%	84%	82,1	84,83	84%	85%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
3	PERSENTASE TINGKAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN			5%	5%	2,15	2,25	5%	4%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
4	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM JAMINAN SOSIAL			51%	52%	55,47	85,84	52%	52%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
<b>INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)</b>										
1	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI			25%	30%	41,67	26,35	30%	30%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
2	PERSENTASE INFORMASI LOWONGAN KERJA YANG TERPENUHI			72%	72%	71,74	72,41	72%	75%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
3	PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN			80%	80%	100	80,95	80%	82%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
4	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERDAFTAR JAMINAN SOSIAL			56%	56%	55,02	76,08	56%	57%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
5	PERSENTASE PROG DAN KEGIATAN YANG MENGACU PERENCANAAN TENAGA KERJA			100%	100%	100	100	100%	100%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bawa isu-isu penting ketenagakerjaan yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja diantaranya sebagai berikut:

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
1	Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);	Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di bawah target yang dicanangkan yaitu 3,45%, sementara pencapaian angka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,68%. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan wirausaha, sehingga sulit bersaing di pasar bebas baik di level lokal/ daerah dan luar Daerah serta kekurangsiapan menghadapi era industri 4.0	Bawa perlunya Pelatihan yang berbasis ketrampilan dan sertifikasi dalam berbagai sektor usaha terhadap pencari kerja yang dengan bentuk uji kompetensi agar pencari kerja/ tenaga kerja tersebut mampu bersaing di level lokal/ daerah dan luar daerah khususnya kesiapan dalam menghadapi era industri 4.0. Selain itu meningkatkan penyuluhan bursa kerja serta informasi kerja ke dalam bentuk bursa kerja serta mengadakan pembinaan serta perluasan kesempatan kerja dengan berkoordinasi dengan para perusahaan agar dapat membuka sektor pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara optimal
2	Lemahnya Perlindungan dan fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan	1. Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten Mojokerto yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan yang baik dan benar termasuk penyediaan sarana dan prasarana keselamatan kerja K3 yang belum merata di perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto; 2. Minimnya angka Tenaga Kerja yang diikutsertakan ke dalam Program Jaminan Sosial (Cth. BPJS) Ketenagakerjaan sebagai fasilitas wajib dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;	1. Bawa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi penerapan norma kerja, sosialisasi penerapan sarana dan prasarana keselamatan kerja (K3) di perusahaan dalam bentuk monitoring secara langsung dan berkala sebagai sarana hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di wilayah Kabupaten Mojokerto; 2. Bawa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi agar perusahaan diwilayah Kabupaten Mojokerto mengikutsertakan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk preventif secara langsung untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja di tempat kerjanya;
3	tingginya resiko Perselisihan Hubungan Industrial di	Tingginya angka Perselisihan Hubungan Industrial antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja;	Bawa dengan banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
	wilayah Kabupaten Mojokerto		contoh isu yang paling banyak terjadi adalah tingginya angka Upah Minimum Kerja, sehingga banyak perusahaan yang mencoba untuk bertahan atau survive dengan cara mengurangi jumlah karyawan maka pemutusan hubungan kerja massal atau penutupan perusahaan sebagai cara yang terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha agar dapat terus menjalankan perusahaannya tidak dapat terhindarkan lagi. Maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto dalam hal ini akan mengupayakan secara maksimal pendekatan secara sosialisasi maupun pembinaan hubungan industrial dalam bentuk klasikal atau ke perusahaan agar setiap perselisihan yang terjadi dapat terselesaikan di tingkat perusahaan secara bipartit
4	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlunya pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap perlindungan dan fasilitasi tCalon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari proses dan tata cara pemberangkatan, selama bekerja dan setelah hubungan kerja berakhir (pemulangan)
5	Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Fasilitasi Transmigrasi	Fasilitasi transmigrasi masih belum dijadikan solusi peningkatan kesejahteraan bagi masy. Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terbatasnya kuota calon transmigran;</li> <li>2. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat terhadap fasilitasi transmigrasi</li> </ol>

## 2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Review RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan riil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan reviu RKPD dengan analisis rencana kerja kebutuhan PD masih disamakan, mengingat pada waktu penyusunan rancanganrencana kerja ini masih belum diterbitkan dokumen RKPD dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto. Reviu ini dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel TC-31.

**TABEL TC-31**  
**REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO**

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
	KETENAGAKERJAAN					KETENAGAKERJAAN						
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,40 (A)	5.379.419.600	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)	5.435.055.600		
			Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi				Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Percentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100 %	17.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Percentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100 %	14.240.300		
1.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.817.100		
	RINCIAN :					RINCIAN :						
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	2.976.400		
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 dokumen	2.840.700		

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	8.423.200	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 dokumen	3.380.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 dokumen	2.660.400	
	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 dokumen	3.350.000	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 dokumen	2.899.600	
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	3.270.000	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	2.863.200	
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD		Kegiatan	-	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			Kegiatan	-		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Percentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	4.850.359.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Percentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,80 %	5.023.395.600	
1.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/bln	4.843.359.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/bln	5.019.362.600	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.464.350.000	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.487.305.000	
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	1.932.120.000	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	2.081.040.000	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	88.740.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	92.868.000	
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan		5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600		

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administriasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	7.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administriasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	4.033.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	7.000.000	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	4.033.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas ASN dinas tenaga kerja	75 %	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas ASN dinas tenaga kerja	86,16 %	-	
1.02.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Percentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100 %	215.560.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Percentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100 %	131.419.700	
1.02.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	125.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	53.259.700	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11 Paket	125.000.000	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	53.259.700	

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	8.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	8.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			7 paket	8.600.000	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			7 paket	8.600.000	
1.02.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 Paket	20.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13 paket	20.000.000	Pembiayaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11 paket	20.000.000	
1.02.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	16.960.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	16.960.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000	
1.02.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	32.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 laporan	45.000.000	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 laporan	32.600.000	

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	196.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	196.000.000	
1.02.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	70.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806	
	Pembiayaan Jasa Air			0 bulan	-	Pembiayaan Jasa Air			0 bulan	-	
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194	
1.02.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	126.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	126.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	126.000.000	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	126.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100 %	100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100 %	70.000.000	

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	85.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	55.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	80.000.000	Pembiayan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	50.000.000	
	Pembiayan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000	Pembiayan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000	
1.02.01.2.09.00 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayan Rehabilitasi gedung kantor			Unit	-	Pembiayan Rehabilitasi gedung kantor			Unit	-	
1.02.01.2.09.00 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	15.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	15.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000	Pembiayan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000	

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Percentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100 %	-	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Percentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100 %	-	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	-	
2.07.02.2.01.00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Percentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92 %	899.388.400	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Percentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92 %	543.937.800	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	95 Orang	869.388.400	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	48 Orang	543.937.800	
2.07.03.2.01.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	80 Orang	669.388.400	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	48 Orang	453.937.800	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat (K)			16 Orang	150.000.000	Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat (K)			0 Orang	-	

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	117.700.000	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	153.937.800	
	Pelatihan dan sertifikasi Digital marketing (K)			16 Orang	101.688.400	Pelatihan dan sertifikasi Digital marketing (K)			0 Orang	-	
	<b>DBHCHT</b>					<b>DBHCHT</b>					
	<b>RINCIAN :</b>					<b>RINCIAN :</b>					
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer Practical Office Advance			16 Orang	150.000.000	Pelatihan dan sertifikasi Komputer Practical Office Advance			16 Orang	150.000.000	
	Pelatihan dan sertifikasi Beauty Aesthetic (DBHCHT) (K)			16 Orang	150.000.000	Pelatihan dan sertifikasi Beauty Aesthetic (DBHCHT) (K)			16 Orang	150.000.000	
2.07.03.2.01.00 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimisasasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	15 Lembaga	200.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimisasasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	24 Lembaga	90.000.000	
	<b>RINCIAN :</b>					<b>RINCIAN :</b>					
	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi			Lembaga	-	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi			24 Lembaga	90.000.000	
	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja			15 Lembaga	200.000.000	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja			Lembaga	-	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	20 Lembaga	30.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	0 Lembaga	-	

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.02.00 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	20 lembaga	30.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	0 lembaga	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja swasta			20 LPK	30.000.000	Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja swasta			0 LPK	-	
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			0 Perusahaan	-	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			0 Perusahaan	-	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 Perusahaan	-	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 Perusahaan	-	
2.07.03.2.04.00 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	0 Perusahaan	-	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	0 Perusahaan	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			0 perusahaan	-	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			0 perusahaan	-	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	16,0 %	340.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	16,0 %	178.923.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100 %	165.000.000	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100 %	65.000.000	

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.2.01.00 02	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 Orang	90.000.000	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 Orang	50.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitasi Transmigrasi			1 Orang	90.000.000	Fasilitasi Transmigrasi			1 Orang	50.000.000	
2.07.04.2.01.00 05	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	60 Orang	75.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	25 Orang	15.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			30 orang	25.000.000	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			25 orang	15.000.000	
	Pembinaan tenaga pendamping TKA			30 orang	50.000.000	Pembinaan tenaga pendamping TKA			0 orang	-	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100 %	125.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100 %	90.000.000	
2.07.04.2.03.00 03	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	250 Orang	125.000.000	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	100 Orang	90.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Job Fair			20 stand	125.000.000	Job Fair			10 stand	90.000.000	
	Penyuluhan informasi bursa kerja				-	Penyuluhan informasi bursa kerja				-	

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	25 Orang	50.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	35 Orang	23.923.000		
2.07.04.2.04.00 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	25 Orang	50.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	35 Orang	23.923.000		
	RINCIAN :					RINCIAN :						
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			25 orang	50.000.000	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			35 orang	23.923.000		
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Kab. Mojokerto	Percentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	82 %	3.281.192.000	Program Hubungan Industrial	Kab. Mojokerto	Percentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	86 %	3.153.331.200		
			Percentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	11,7 %				Percentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	11,7 %			
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Percentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100 %	3.281.192.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Percentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100 %	3.153.331.200		

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.2.02.00 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	20 Perkara	180.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	20 Perkara	90.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			3 Orang	50.000.000	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			0 Orang	-	
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			60 Orang	30.000.000	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			0 Orang	-	
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			30 perusahaan	50.000.000	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			0 perusahaan	-	
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			30 perusahaan	50.000.000	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 kegiatan	90.000.000	
2.07.05.2.02.00 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	25.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			0 Perkara	-	
2.07.05.2.02.00 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	45.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	40.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	45.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	40.000.000	

KODE	RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.2.02.00 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	2789 5 Orang	3.031.192.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	2793 0 Orang	3.023.331.200	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			45 Orang	35.000.000	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			50 Orang	33.095.100	
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			50 Orang	50.000.000	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			60 Orang	47.041.050	
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			60 Orang	75.000.000	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	72.003.050	
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			2774 0 Orang	2.871.192.000	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			2774 0 Orang	2.871.192.000	Pembayaran iuran bpjs ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dan petani tembakau selama 1 (satu) tahun [27.740 Org X 16.800 X 1 Tahun]
					9.900.000.000					9.311.247.600	

## **2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Bawa kajian dalam penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berpedoman kepada Program-program Nasional dan prioritas kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Mojokerto, dimana dapat dilihat pada Tabel TC-32

**TABEL TC-32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**  
**TAHUN 2025 KABUPATEN MOJOKERTO**

## DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2026, maka diperoleh hasil telaah sebagai berikut:

- **Visi**

Terwujudnya masyarakat jawa timur yang adil, sejahtera unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong

- **Misi**

Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan

- **Tujuan**

Meningkatkan pedayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja serta sebagai upaya menurunkan pengangguran

- **Sasaran**

1. Meningkatnya kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
2. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial;
4. Meningkatnya efektifitas pengawasan di bidang norma ketenagakerjaan;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas nasional tersebut maka disusun program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 antara lain:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program hubungan industrial

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, Dinas Tenaga Kerja Melaksanakan Misi Ke 2 “**Membangun Kemandirian Ekonomi**

**Berdimensi Kerakyatan".** Sementara Tujuannya adalah "**Penurunan Angka Pengangguran**" dan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. ***Meningkatnya penempatan tenaga kerja;***
2. ***Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif***

Berikut ini ditampilkan Tabel 3.2.1 sebagai pedoman sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

**TABEL 3.2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Penurunan Angka Pengangguran</b>		<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>5,75</b>	<b>5,62</b>	<b>5,42</b>	<b>5,09</b>	<b>4,76</b>	<b>4,43</b>	<b>4,10</b>
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 (B)	70,00 (B)	70,50 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	72,50 (BB)
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja					84,00%	85,00%	86,00%
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Konduatif	Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan		6%	6%	5%	5%	4%	4%

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan. Dimana pada tahun 2025 mendatang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang Ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025, sesuai rencana strategis dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih mengusung tema permasalahan penurunan angka pengangguran yang berkorelasi dengan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) maka dari itu adapun program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dalam penanganan penekanan tingkat pengangguran terbuka harus tepat sasaran agar pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto berhasil pada 5 (lima) tahun ke depan ini, Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana nomenklatur dan kodefikasi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel TC – 33.

**TABEL TC-33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	KETENAGAKERJAAN								
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,45 (A)	5.435.055.600			81,45 (A)	5.815.509.492
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan		2 Inovasi				2 Inovasi	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100 %	14.240.300			100 %	15.237.121
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	5.817.100			2 Dokumen	6.224.297
	RINCIAN :								
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	2.976.400			1 dokumen	3.184.748
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 dokumen	2.840.700			1 dokumen	3.039.549
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	8.423.200			6 Laporan	9.012.824
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 dokumen	2.660.400			4 dokumen	2.846.628

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 dokumen	2.899.600			1 dokumen	3.102.572
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	2.863.200			1 dokumen	3.063.624
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			Kegiatan	-			Kegiatan	-
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90,80 %	5.023.395.600			90,80 %	5.375.033.292
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 Orang/bln	5.019.362.600			36 Orang/bln	5.370.717.982
	RINCIAN :								
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.487.305.000			36 Org/bln	2.661.416.350
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	2.081.040.000			36 Org/bln	2.226.712.800
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	92.868.000			36 Org/bln	99.368.760
	Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600			5527 Org/bln (12 bln)	383.220.072
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		1 dokumen	4.033.000			1 dokumen	4.315.310
	RINCIAN :								
	Pembayaran administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	4.033.000			1 dokumen	4.315.310
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN dinas tenaga kerja		86,15 %	-			86,15 %	-
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		0 Paket	-			0 Paket	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-			0 paket	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100 %	131.419.700			100 %	140.619.079
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket	53.259.700			6 Paket	56.987.879
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	53.259.700			6 Paket	56.987.879
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		7 Paket	8.600.000			7 Paket	9.202.000
	RINCIAN :								
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			7 paket	8.600.000			7 paket	9.202.000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		11 Paket	20.000.000			11 Paket	21.400.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11 paket	20.000.000			11 paket	21.400.000
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 Paket	16.960.000			1 Paket	18.147.200

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	RINCIAN :								
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000			1 paket	18.147.200
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 Laporan	32.600.000			100 Laporan	34.882.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 laporan	32.600.000			100 laporan	34.882.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100 %	196.000.000			100 %	209.720.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		24 Laporan	70.000.000			24 Laporan	74.900.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806			12 bulan	6.654.122
	Pembiayaan Jasa Air			0 bulan	-			0 bulan	-
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194			12 bulan	68.245.878
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan	126.000.000			12 Laporan	134.820.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	126.000.000			12 Laporan	134.820.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik		100 %	70.000.000			100 %	74.900.000
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit	55.000.000			6 Unit	58.850.000
	<b>RINCIAN :</b>								
	Pembiaayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	50.000.000			6 Unit	53.500.000
	Pembiaayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000			6 Unit	5.350.000
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		0 Unit	-			0 Unit	-
	<b>RINCIAN :</b>								
	Pembiaayaan Rehabilitasi gedung kantor			Unit	-			Unit	-
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		18 Unit	15.000.000			18 Unit	16.050.000
	<b>RINCIAN :</b>								
	Pembiaayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000			18 Unit	16.050.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja		100 %	-			100 %	-
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0 dokumen	-			0 dokumen	-
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		0 dokumen	-			0 dokumen	-
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-			0 dokumen	-
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi		92 %	543.937.800			92 %	575.713.446
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		48 Orang	543.937.800			48 Orang	575.713.446
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		48 Orang	453.937.800			48 Orang	485.713.446
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat (K)			0 Orang	-			0 Orang	-
	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	153.937.800			16 Orang	164.713.446
	Pelatihan dan sertifikasi Digital marketing (K)			0 Orang	-			0 Orang	-
	DBHCHT								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer Practical Office Advance			16 Orang	150.000.000			16 Orang	160.500.000
	Pelatihan dan sertifikasi Beauty Aesthetic (DBHCHT) (K)			16 Orang	150.000.000			16 Orang	160.500.000
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		24 Lembaga	90.000.000			24 Lembaga	90.000.000
	RINCIAN :								
	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi			24 Lembaga	90.000.000			24 Lembaga	96.300.000
	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja			Lembaga	-			Lembaga	-
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		0 Lembaga	-			0 Lembaga	-
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		0 lembaga	-			0 lembaga	-
	RINCIAN :								
	Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja swasta			0 LPK	-			0 LPK	-
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			0 Perusahaan	-			0 Perusahaan	-
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		0 Perusahaan	-			0 Perusahaan	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		0 Perusahaan	-			0 Perusahaan	-
	RINCIAN :								
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			0 perusahaan	-			0 perusahaan	-
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n		16,0 %	178.923.000			16,0 %	184.097.610
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100 %	65.000.000			100 %	68.500.000
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		1 Orang	50.000.000			1 Orang	53.500.000
	RINCIAN :								
	Fasilitasi Transmigrasi			1 Orang	50.000.000			1 Orang	53.500.000
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		25 Orang	15.000.000			25 Orang	15.000.000
	RINCIAN :								
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			25 orang	15.000.000			25 orang	16.050.000
	Pembinaan tenaga pendamping TKA			0 orang	-			0 orang	-
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100 %	90.000.000			100 %	90.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		100 Orang	90.000.000			100 Orang	90.000.000
	RINCIAN :								
	Job Fair			10 stand	90.000.000			10 stand	96.300.000
	Penyuluhan informasi bursa kerja				-				-
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		35 Orang	23.923.000			35 Orang	25.597.610
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		35 Orang	23.923.000			35 Orang	25.597.610
	RINCIAN :								
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			35 orang	23.923.000			35 orang	25.597.610
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Percentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan		86 %	3.153.331.200			86 %	3.374.064.384
		Percentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial		11,7 %				11,7 %	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Percentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100 %	3.153.331.200			100 %	3.374.064.384

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah		20 Perkara	90.000.000			20 Perkara	96.300.000
	RINCIAN :								
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			0 Orang	-			0 Orang	-
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			0 Orang	-			0 Orang	-
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			0 perusahaan	-			0 perusahaan	-
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 kegiatan	90.000.000			3 kegiatan	96.300.000
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		0 Perkara	-			0 Perkara	-
	RINCIAN :								
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			0 Perkara	-			0 Perkara	-
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga	40.000.000			1 Lembaga	42.800.000
	RINCIAN :								
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	40.000.000			2 Kegiatan	42.800.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		27930 Orang	3.023.331.200			27930 Orang	3.234.964.384
	RINCIAN :								
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			50 Orang	33.095.100			50 Orang	35.411.757
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			60 Orang	47.041.050			60 Orang	50.333.924
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	72.003.050			80 Orang	77.043.264
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	2.871.192.000			27740 Orang	3.072.175.440
					9.311.247.600				9.949.384.932

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bahwa rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan rekapitulasi rancangan tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2025 kemudian disinkronisasikan melalui RKPD dengan pagu indikatif yang meliputi anggaran berbasis APBD dan APBD Provinsi serta sumber dana yang berbasis dana transfer umum dan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
	KETENAGAKERJAAN												
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,4 5 (A)		5.435.055.600					
					Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi							
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100 %		14.240.300					
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		5.817.100					
	RINCIAN :												
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 dokumen		2.976.400					
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD					1 dokumen		2.840.700					
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan		8.423.200					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan					4 dokumen		2.660.400					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyusunan Dokumen LKjIP					1 dokumen		2.899.600					
	Penyusunan Dokumen SAKIP					1 dokumen		2.863.200					
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD					Kegiatan		-					
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90,8 %		5.023.395.600					
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 Orang/bln		5.019.362.600					
	RINCIAN :												
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN					36 Org/bln		2.487.305.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)					36 Org/bln		2.081.040.000					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN					36 Org/bln		92.868.000					
	Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan					5527 Org/bln (12 bln)		358.149.600					
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		1 dokumen		4.033.000					
	RINCIAN :												
	Pembayaran administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 dokumen		4.033.000					
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas ASN dinas tenaga kerja		86,1 %		-					
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0 Paket		-					
	RINCIAN :												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembayaan Pengadaan Pakaian Dinas					0 paket		-					
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100 %		131.419.700					
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket		53.259.700					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Paket		53.259.700					
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		7 Paket		8.600.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					7 paket		8.600.000					
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		11 Paket		20.000.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembayaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11 paket		20.000.000					
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 Paket		16.960.000					
	<b>RINCIAN :</b>												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembiaayaan bahan/ material ATK					1 paket		16.960.000					
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 Laporan		32.600.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembiaayaan Rapat Perjalanan Dinas					100 laporan		32.600.000					
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100 %		196.000.000					
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		24 Laporan		70.000.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembiaayaan Jasa Komunikasi					12 bulan		6.218.806					
	Pembiaayaan Jasa Air					0 bulan		-					
	Pembiaayaan Jasa Listrik					12 bulan		63.781.194					
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan		126.000.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembiaayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)					12 Laporan		126.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik		100 %		70.000.000					
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit		55.000.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembentukan Pendekatan Kendaraan Dinas Kantor					6 Unit		50.000.000					
	Pembentukan Pendekatan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor					6 Unit		5.000.000					
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 Unit		-					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembentukan Pendekatan Rehabilitasi gedung kantor					Unit		-					
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		18 Unit		15.000.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembentukan Pendekatan Sarana Prasarana Gedung Kantor					18 Unit		15.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja				Percentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100 %		-					
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0 dokumen		-					
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		0 dokumen		-					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja					0 dokumen		-					
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				Percentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92 %		543.937.800					
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		48 Orang		543.937.800					
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		48 Orang		453.937.800					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat (K)					0 Orang		-					
	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)					16 Orang		153.937.800					
	Pelatihan dan sertifikasi Digital marketing (K)					0 Orang		-					
	<b>DBHCHT</b>												
	<b>RINCIAN :</b>												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer Practical Office Advance					16 Orang		150.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Beauty Aesthetic (DBHCHT) (K)					16 Orang		150.000.000					
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		24 Lembag a		90.000.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi					24 Lembag a		90.000.000					
	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja					Lembaga		-					
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		0 Lembag a		-					
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		0 lembaga		-					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja swasta					0 LPK		-					
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri					0 Perusahaan		-					
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		0 Perusah ahan		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		0 Perusahaan	-	-					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil					0 perusahaan	-	-					
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja				Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	16,0 %		178.923.000					
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100 %		65.000.000					
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		1 Orang		50.000.000					
	<b>RINCIAN :</b>					1 Orang		50.000.000					
	Fasilitasi Transmigrasi												
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		25 Orang		15.000.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					25 orang		15.000.000					
	Pembinaan tenaga pendamping TKA					0 orang	-	-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100 %		90.000.000					
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja			Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		100 Orang		90.000.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Job Fair					10 stand		90.000.000					
	Penyuluhan informasi bursa kerja							-					
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		35 Orang		23.923.000					
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		35 Orang		23.923.000					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					35 orang		23.923.000					
2.07.05	Program Hubungan Industrial				Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	86 %		3.153.331.200					
					Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	11,7 %							

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100 %		3.153.331.200					
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Perselisihan yang dicegah		20 Perkara		90.000.000					
	RINCIAN :												
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto					0 Orang		-					
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing					0 Orang		-					
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial					0 perusahaan		-					
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan					3 kegiatan		90.000.000					
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		0 Perkara		-					
	RINCIAN :												
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					0 Perkara		-					
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembag a		40.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>RINCIAN :</b>												
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit					2 Kegiatan		40.000.000					
2.07.05.2.02.0005	<b>Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</b>			Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		2793 Orang 0		3.023.331.200					
	<b>RINCIAN :</b>												
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak					50 Orang		33.095.100					
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja					60 Orang		47.041.050					
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan					80 Orang		72.003.050					
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT)					2774 Orang 0		2.871.192.000					
								9.311.247.600					

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Catatan Penting**

Dokumen rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah disusun ini, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025 yang akan datang.

#### **b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Bawa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen rencana kerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Rencana Strategis PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

#### **c. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2021-2026 karena Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, Desember 2024

